

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

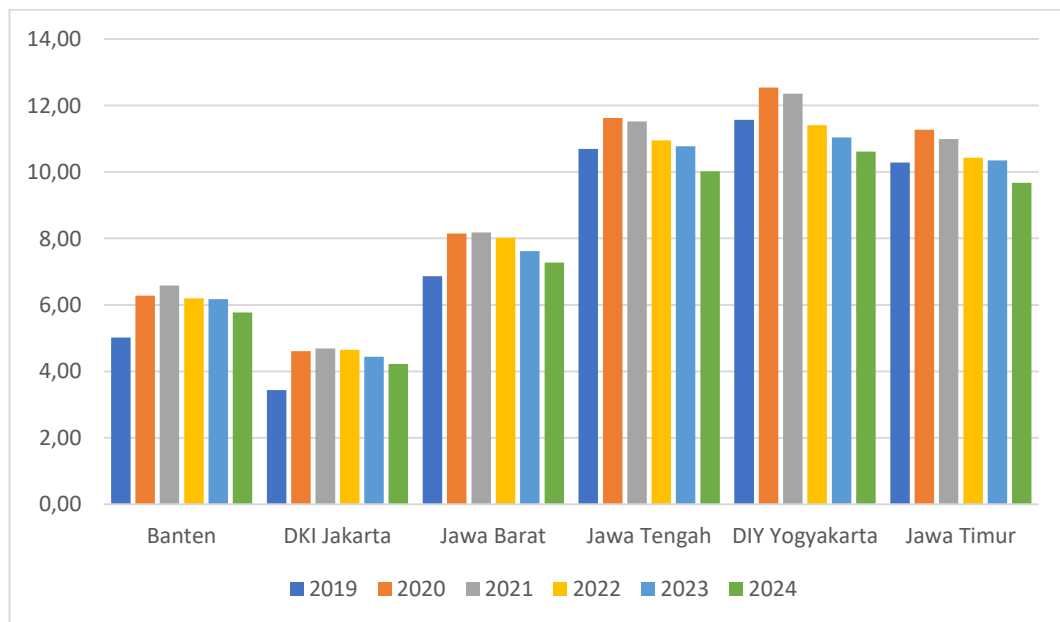
### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kemiskinan adalah persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan menjadi fokus pemerintah suatu negara. Kemiskinan merupakan masalah kompleks bagi negara berkembang meskipun ada beberapa keberhasilan yang telah dilakukan oleh negara berkembang dalam rangka pembangunan seperti dalam hal produksi dan pendapatan nasional (Sartika et al., 2016). Indonesia adalah negara berkembang yang masih banyak menghadapi masalah sosial ekonomi salah satunya adalah kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan merupakan kondisi ketika individu tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang dalam hal ini kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Rendahnya pengeluaran ini akan berpengaruh pada pemenuhan standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan yang tinggi juga akan menghambat pembangunan ekonomi karena semakin tinggi tingkat kemiskinan semakin besar juga biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan ekonomi. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus membuat kebijakan dan program yang tepat untuk mengatasi kemiskinan (Mirza, 2012).

Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan penduduk dapat tercapai ketika adanya penurunan tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan yang merata yang diterima penduduk. Kondisi tingkat kemiskinan dapat menjadi salah satu indikator yang dapat

mencerminkan kesejahteraan dari sebuah negara/daerah (Christianto., 2013)

Pembangunan ekonomi yang cenderung terpusat di pulau Jawa, menyebabkan pulau Jawa menjadi pulau terpadat di Indonesia dengan proporsi sebesar 56,10% penduduk tidak terlepas dari kemiskinan. Berikut disajikan data Persentase Penduduk Miskin setiap provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019 – 2024.



**Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2019-2024 (%)**

Sumber: BPS (diolah, 2025)

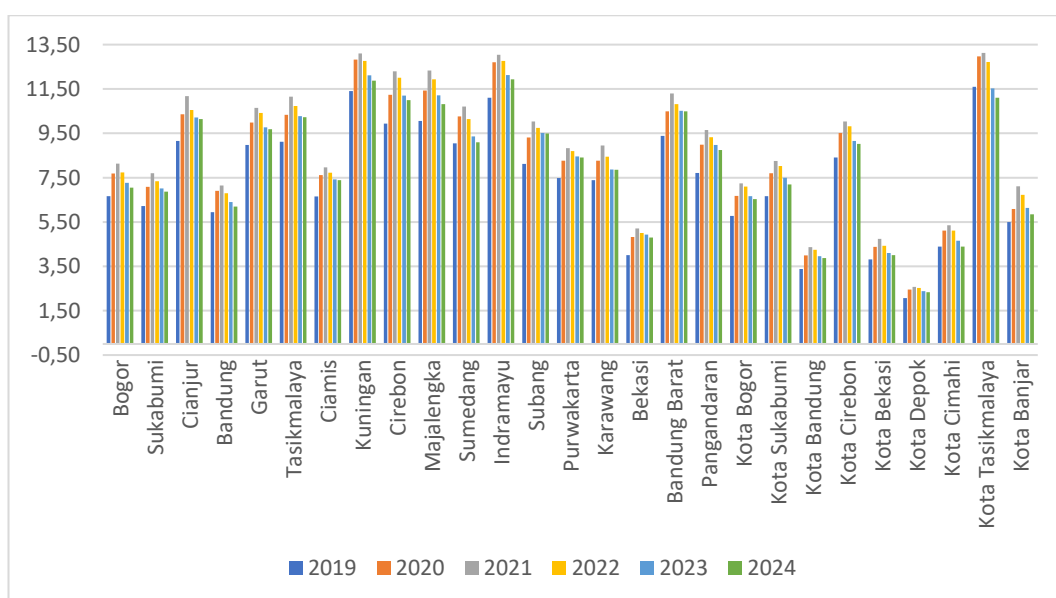
Gambar 1.1 menunjukkan perbandingan kemiskinan setiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2019 – 2024. Jika dilihat secara umum, persentase penduduk miskin dari tahun 2019 – 2024 cenderung mengalami penurunan. Dengan rata rata penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 11,59. Jawa barat menduduki posisi keempat setelah Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan rata rata sebesar 7,68 dengan rata rata kemiskinan yang cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa Jawa Barat sebagai provinsi

yang dapat menekan angka kemiskinan dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak setinggi Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, maupun Jawa Timur, pemilihan Jawa Barat sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik ekonomi dan sosial yang kompleks. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sehingga jumlah absolut penduduk miskin di wilayah ini tetap menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa, meskipun persentasenya relatif lebih rendah. Selain itu, Jawa Barat memiliki struktur ekonomi yang sangat beragam, mulai dari kawasan industri besar di daerah perkotaan seperti Bekasi, Karawang, dan Bogor hingga wilayah perdesaan dengan dominasi sektor pertanian. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang cukup signifikan di dalam satu provinsi. Oleh karena itu, fluktuasi variabel makroekonomi seperti upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi diperkirakan memiliki pengaruh yang berbeda dan menarik untuk dikaji terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS 2024 menyebutkan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah provinsi Jawa Barat sebesar 50.489.208 juta jiwa. Persentase penduduk Jawa Barat berkembang pesat di angka 5,2% pertahun. Hal itu menunjukkan bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan perkembangan jumlah penduduk yang relatif tinggi dikarenakan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang dipadati oleh kawasan industri dan tingkat perekonomian yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa.

Industri di Jawa Barat terus berkembang pesat, menjadikan industri pengolahan sebagai sektor utama penyumbang PDRB dengan kontribusi sekitar 40,94% pada triwulan III 2025. Sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, meskipun pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengalami perlambatan pada kuartal tertentu (BPS, 2025). Adanya kawasan industri dan jumlah penduduk tersebut menjadikan Jawa Barat tidak terlepas dari problematika kemiskinan.



**Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2019-2024 (%)**

Sumber: BPS (diolah, 2025)

Grafik diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2019-2024 mengalami kondisi yang fluktuatif dan cenderung menurun setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 terkait efek pandemi Covid-19 di Indonesia. Beberapa wilayah dengan angka persentase kemiskinan yang tinggi diantaranya Kabupaten Indramayu, Kuningan, Kota Tasikmalaya, Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya dengan rata rata diatas 10%. Sedangkan daerah dengan

angka kemiskinan dengan rata rata dibawah 10% diantaranya Kota Bandung, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Hal ini menunjukkan persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Jawa Barat tidak merata dan menyebar dari tahun 2019-2024. Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami fluktuasi. Persentase penduduk miskin tertinggi pada terdapat di Kabupaten Indramayu sebesar 11,93%. Sedangkan daerah dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Kota Depok sebesar 2,34%. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan pada tingkat persentase penduduk miskin Kabupaen/Kota di Jawa Barat.

Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki 27 Kabupaten/Kota dengan kondisi kemiskinan tidak merata dan menyebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Tingkat kemiskinan di suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial yang saling berkaitan. Beberapa faktor yang diduga secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia antara lain Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Inflasi. Setiap variabel ini memiliki dampak tersendiri dalam memengaruhi kemampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (Pigih Panyinar, 2023).

Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar minimum upah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerjanya di suatu daerah Kabupaten/Kota. Kenaikan UMK berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pekerja berpenghasilan rendah mendapatkan upah yang lebih layak. Namun, kenaikan UMK juga dapat memiliki dampak sebaliknya jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup. Dalam beberapa

kasus, peningkatan UMK yang signifikan dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja akibat pengusaha yang tidak mampu membayar upah tersebut, yang pada akhirnya bisa meningkatkan pengangguran (Hindayati, 2021). Peningkatan pendapatan melalui kenaikan upah akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli, kemampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan, akan lebih baik, sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan (Todaro dan Smith, 2015).

Uraian tersebut sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Upah Minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Agustiani *et al.*, 2023). Menurut teori, peningkatan upah minimum merupakan mekanisme untuk meningkatkan pendapatan penduduk dalam hal kesejahteraan pekerja, dan pada akhirnya, upah minimum dapat mengurangi kemiskinan (Boediono, 2014). Adapun data upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama periode 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 1.1. Data Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 (dalam Rupiah)**

No	Wilayah	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Bogor	3.763.406	4.083.670	4.217.206	4.217.206	4.520.212	4.579.541
2	Kab. Sukabumi	2.791.016	3.028.532	3.125.445	3.125.445	3.351.883	3.384.491
3	Kab. Cianjur	2.336.005	2.534.799	2.534.799	2.699.814	2.893.229	2.915.102
4	Kab. Bandung	2.893.075	3.139.275	3.241.930	3.241.930	3.492.466	3.527.967
5	Kab. Garut	1.807.286	1.961.086	1.961.086	1.975.221	2.117.318	2.186.437
6	Kab. Tasikmalaya	2.075.189	2.251.788	2.251.788	2.326.772	2.499.954	2.535.204
7	Kab. Ciamis	1.733.162	1.880.655	1.880.655	1.897.867	2.021.657	2.089.464
8	Kab. Kuningan	1.734.994	1.882.642	1.882.642	1.908.102	2.010.734	2.074.666
9	Kab. Cirebon	2.024.160	2.196.416	2.269.557	2.279.983	2.430.781	2.517.730
10	Kab. Majalengka	1.791.693	1.944.166	2.009.000	2.027.619	2.180.603	2.257.871
11	Kab. Sumedang	2.893.075	3.139.275	3.241.930	3.241.930	3.471.134	3.504.308
12	Kab. Indramayu	2.117.714	2.297.931	2.373.073	2.391.567	2.541.997	2.623.697
13	Kab. Subang	2.732.900	2.965.468	3.064.218	3.064.218	3.273.811	3.294.485
14	Kab. Purwakarta	3.722.300	4.039.068	4.173.569	4.173.569	4.464.675	4.499.768
15	Kab. Karawang	4.234.010	4.594.325	4.798.312	4.798.312	5.176.179	5.257.834
16	Kab. Bekasi	4.146.126	4.498.962	4.791.844	4.791.844	5.137.575	5.129.263
17	Kab. Bandung Barat	2.898.745	3.145.428	3.248.283	3.248.283	3.480.795	3.508.677
18	Kab. Pangandaran	1.714.673	1.860.591	1.860.591	1.884.364	2.018.389	2.086.126

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	Kota Bogor	3.842.786	4.169.807	4.169.807	4.330.250	4.639.429	4.813.988
20	Kota Sukabumi	2.331.753	2.530.183	2.530.183	2.562.434	2.893.229	2.834.399
21	Kota Bandung	3.339.581	3.623.779	3.742.276	3.774.861	4.048.463	4.209.309
22	Kota Cirebon	2.045.422	2.219.488	2.271.202	2.304.944	2.456.517	2.533.038
23	Kota Bekasi	4.229.757	4.589.709	4.782.936	4.816.921	5.158.248	5.343.430
24	Kota Depok	3.872.552	4.202.106	4.339.515	4.377.232	4.694.494	4.878.612
25	Kota Cimahi	2.893.074	3.139.275	3.241.929	3.272.669	3.514.093	3.627.880
26	Kota Tasikmalaya	2.086.530	2.264.093	2.264.093	2.363.390	2.533.341	2.630.951
27	Kota Banjar	1.688.218	1.831.885	1.831.885	1.852.100	1.988.119	2.070.192

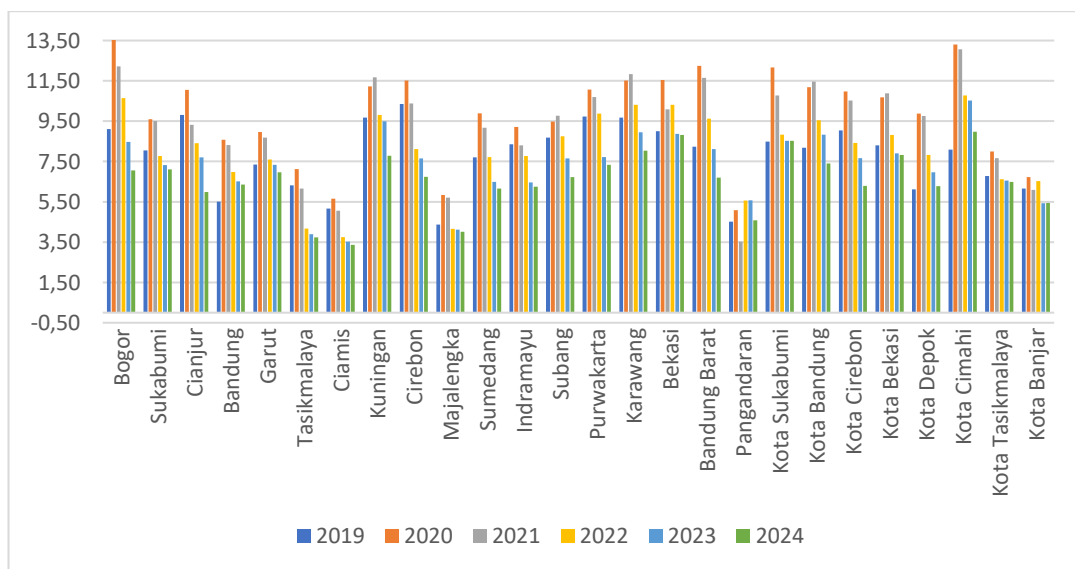
Sumber: BPS (diolah, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat kebijakan penetapan upah minimum di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tidak seragam dan sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, produktivitas, serta kemampuan dunia usaha di masing-masing wilayah. Perbedaan besaran upah minimum tersebut dapat mencerminkan kesenjangan ekonomi antarwilayah dalam satu provinsi.

Selain faktor upah minimum, faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan namun aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi secara langsung berkaitan dengan kemiskinan, karena individu yang menganggur tidak memiliki pendapatan tetap, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sukirno (2016: 71) menyatakan bahwa pengangguran berkorelasi dengan meningkatnya kemiskinan karena pengangguran menyebabkan hilangnya pendapatan dalam keluarga.

Menurut Nasir, M. (2008: 90) permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan multidimensi. Kemiskinan di Jawa Barat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah kurang, tingkat pengangguran yang tinggi, dan IPM yang masih kurang. Dapat dikatakan miskin apabila belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berprestasi.

Tingkat pengangguran di Jawa Barat masih dapat dikatakan tinggi, karena masih banyak tenaga kerja yang seharusnya dapat bekerja namun karena beberapa faktor diantaranya yaitu minimnya lapangan pekerjaan menyebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Adapun persentase rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019-2024 dalam dilihat dari gambar berikut.



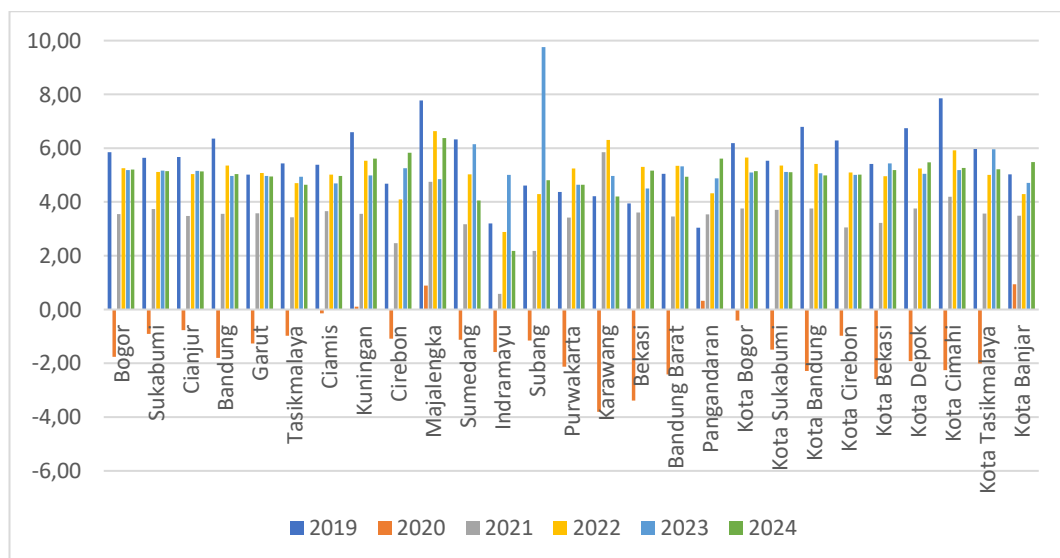
**Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 (%)**

Sumber: BPS (diolah, 2025)

Menurut data dari BPS sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka yang paling rendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 3,37% pada Kabupaten Ciamis, sedangkan pada tahun 2020 merupakan tahun dengan persentase pengangguran terbuka paling tinggi yaitu sebesar 14,29% pada Kabupaten Bogor. Hal ini tentunya dapat memberi pandangan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat masih belum stabil sehingga naik turunnya tergantung dari jumlah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia dan faktor lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki hubungan erat

dengan tingkat kemiskinan, karena pengangguran secara langsung mempengaruhi pendapatan masyarakat dan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar. Semakin tinggi TPT, semakin banyak orang yang tidak memiliki pendapatan tetap, yang pada akhirnya meningkatkan kemiskinan.

Faktor selanjutnya yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan pada suatu negara ialah faktor Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang menggambarkan perubahan positif dalam nilai produksi suatu negara atau wilayah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, yang kemudian dapat mengurangi kemiskinan. Menurut Mankiw (2014: 97), pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam enam tahun terakhir dapat dilihat dari gambar berikut.



**Gambar 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2019-2024 (%)**

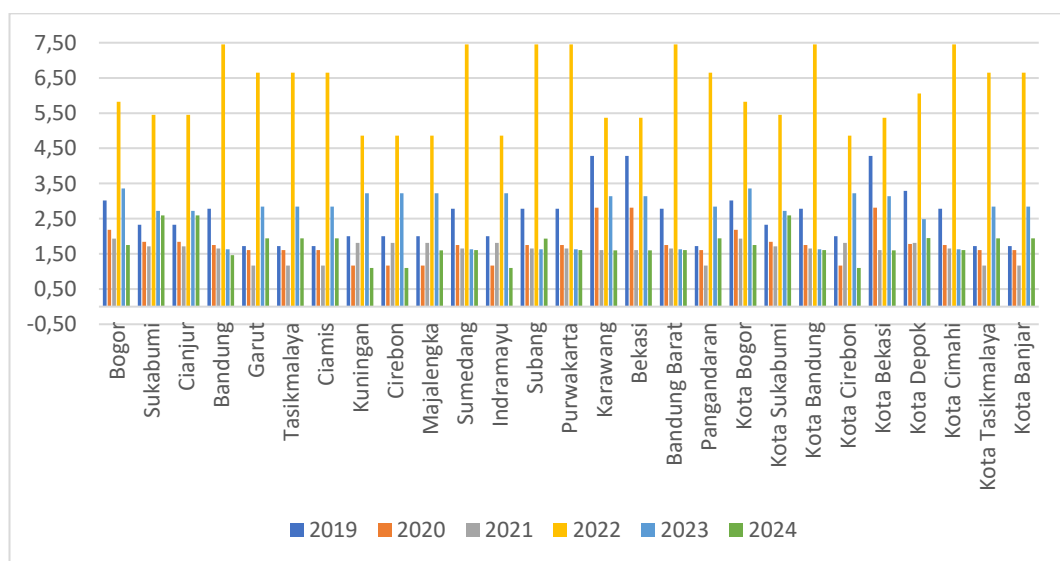
Sumber: BPS (diolah, 2025)

Gambar 1.4 menunjukkan persentase pertumbuhan ekonomi selama tahun 2019-2024. Berdasarkan data tersebut menunjukkan tingkat keparahan pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2020 sebesar -3,80% di Kabupaten Karawang karena berbagai macam faktor. Sedangkan dari tahun 2021-2024 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di atas 2% yang mengindikasikan bahwa persentase pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021 ke 2024. Dan tingkat kesuksesan presentase pertumbuhan ekonomi terjadi di tahun 2023 menyentuh angka 9,76% di Kabupaten Subang. Ketika laju pertumbuhan ekonomi meningkat, sektor-sektor produksi dan industri berkembang, menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan kesehatan, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan, hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Lestari et., all (2024) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Selain berdampak pada peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi yang baik juga berperan dalam menekan laju inflasi. Ketika pertumbuhan ekonomi stabil dan berkelanjutan, sektor produksi dan industri berkembang, sehingga pasokan barang dan jasa meningkat. Ketersediaan barang yang memadai dapat membantu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Oleh karena itu, faktor inflasi menjadi salah satu aspek yang

turut mempengaruhi tingkat kemiskinan, di samping pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Inflasi, yang diartikan sebagai kenaikan umum harga barang dan jasa, dapat memperburuk kemiskinan jika pendapatan masyarakat tidak mampu mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok. Ketika inflasi tinggi, daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kelompok miskin yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan dasar. Samuelson dan Nordhaus (2004) menyatakan bahwa inflasi memiliki dampak regresif terhadap kelompok miskin, karena kenaikan harga barang dan jasa lebih memberatkan kelompok berpenghasilan rendah. Adapun Data Inflasi Indonesia dalam enam tahun terakhir dapat dilihat dari gambar berikut.



**Gambar 1.5 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 (%)**

Sumber: BPS (diolah, 2025)

Gambar 1.5 menunjukkan tingkat inflasi di Jawa Barat selama periode 2019-2024. Berdasarkan data yang ditampilkan, inflasi setiap daerah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Inflasi terbesar tercatat pada Daerah Kota Bandung

dan sekitarnya yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kota Cimahi pada tahun 2022 sebesar 7,45%, kemudian inflasi terendah tercatat pada Kota Cirebon dan sekitarnya yang mencakup Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu pada tahun 2024 sebesar 1,10%. Inflasi memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, terutama melalui penurunan daya beli masyarakat. Ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa naik, sementara pendapatan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, tidak selalu mengalami kenaikan yang sebanding. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan kesehatan menurun, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Hasil penelitian Susanto (2018) menjelaskan bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, hal ini karena inflasi yang tinggi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang berkontribusi pada berkurangnya kesempatan kerja dan meningkatnya angka pengangguran, sehingga memperparah kondisi kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 14 tahun berakhir dengan mengambil judul penelitian **“Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2024”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka persoalan yang penelitian yang ingin dipecahkan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2024.
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2024.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2024.
2. Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2024.

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan tentang pengaruh upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat periode 2011- 2024.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, menambah wawasan terkait pengaruh upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
- b. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta sebagai rujukan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang Ekonomi Pembangunan.
- c. Bagi Pemerintah, memberikan masukan dan wawasan untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang tepat terkait kemiskinan di Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai program pembangunan ekonomi yang lebih baik.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah Indonesia. Proses pengambilan data upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat kemiskinan dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

